

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan seluruh perusahaan di Indonesia dapat mendorong ekspansi yang stabil dan menghasilkan pendapatan yang memenuhi kebutuhan para pemegang saham dan aspirasi masyarakat umum, yang suatu hari nanti dapat menjadi investor. Bisnis akan berjalan berdasarkan tujuan dan bertanggungjawab pada semua pelaporan yang berkelanjutan. Pelaporan yang berkelanjutan akan memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengkomunikasikan hasil kinerjanya kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaporan keberlanjutan juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi isu sosial serta dapat mengevaluasi risiko yang bisa saja akan terjadi. Perusahaan dituntut untuk tidak sekadar mengutamakan tujuan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan, melainkan juga memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lingkungan (Salsabila & Novianty, 2022).

Konsep keberlanjutan menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Jika tanggung jawab sebuah perusahaan tidak sejalan dengan keberlanjutan, akan memberikan dampak negatif terhadap reputasinya. Peningkatan citra, nama baik, dan kemampuan perusahaan menjadi upaya penting dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan dan sosial. Perusahaan dapat menyusun kerangka kerja dan strategi bisnis yang sejalan dengan situasi bisnisnya sehingga tidak merusak atau mencemari lingkungan

(Ih, 2021). Semenjak munculnya istilah *Corporate Social Responsibility* dan keberlanjutan (*sustainability*), kelestarian lingkungan menjadi fokus



utama dalam bisnis. Frekuensi terjadinya kejadian lingkungan dan kemanusiaan di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan sering menjadi penyebab utama (Safitri & Saifudin, 2019).

Pada tahun 2015, para pemimpin dunia secara resmi mengumumkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainability development goals*) sebagai salah satu inisiatif global yang telah diikuti oleh 193 negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tema “mengubah dunia kita: agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan”, SDGs bertujuan untuk menyasar semua pelaku pembangunan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi dan lainnya. Rencana ini menguraikan 17 tujuan dan 169 target untuk aksi di seluruh dunia selama 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 dan berakhir pada tahun 2030). Hal tersebut diambil untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan menjaga kelestarian lingkungan. *Sustainability reporting* yang diperkenalkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) sejak tahun 1990, diamanatkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 (2017). Laporan ini wajib bagi emiten, perusahaan publik dan lembaga jasa keuangan untuk mengungkapkan *sustainability reporting*. Banyak lembaga atau yurisdiksi yang mengharuskan persyaratan otoritas hukum terkait dengan *sustainability reporting*. Berdasarkan dari persyaratan tersebut perusahaan dapat menghindari sanksi dan menjaga hubungan baik terhadap otoritas hukum tersebut.

Fenomena pelaporan keberlanjutan telah diimplementasikan sebagai pengungkapan yang wajib bagi perusahaan di beberapa negara, sementara di beberapa negara lainnya hanya menjadikan sebagai persyaratan sukarela.



sendiri memberlakukan pelaporan keberlanjutan sebagai persyaratan wajib bagi industri yang sensitif seperti perbankan dan keuangan. Industri

yang tidak sensitif masih bersifat opsional atau sukarela dalam penerapan pelaporan keberlanjutan, seperti halnya pada perusahaan sektor tambang. Namun, minat perusahaan akan menerbitkan laporan keberlanjutan tidak berkurang karena meningkatnya peraturan lingkungan hidup di banyak negara. Tuntutan masyarakat terhadap peran perusahaan semakin meningkat dan mendorong perusahaan untuk memberikan laporan yang transparan dan akuntabel (Santoso *et al.*, 2023).

Fenomena yang terjadi pada tahun 2023, perusahaan tambang di Indonesia menghadapi tantangan terkait ketidakpastian lingkungan dalam penyusunan *sustainability reporting*. Faktornya seperti deforestasi, emisi karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati menjadi isu yang harus dihadapi. Seperti yang dilansir pada PT Vale Indonesia yang bergerak pada bidang pertambangan menyatakan bahwa komitmennya terhadap ESG berfokus pada isu tersebut PT Vale telah menjadikan aspek keberlanjutan sebagai bagian penting dari sebuah perusahaan (Kompas.com, 2023).

Riset pada laporan *Institute for Energy Economic and Financial Analysis* (IEEFA) mengungkapkan bahwa pertambangan batu bara di Indonesia berpotensi melakukan praktik *greenwashing* karena masih mendukung operasional listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Setelah beberapa emiten batu bara membagikan dividen pada semester pertama 2023, perusahaan yang menangani dan menyediakan pasokan listrik sendiri memiliki tumpukan kas gabungan sebesar USD 6,5 miliar pada akhir tahun lalu. Analisis Pembiayaan Energi IEEFA, mengungkapkan bahwa besarnya keuntungan dan jumlah kas beberapa emiten batu bara mendorong perusahaan untuk menambah kapasitas pasokan batu bara



U. Meskipun Indonesia mendorong untuk melakukan produksi bahan aluminium untuk mendukung transisi energi perlu disertai kewaspadaan

potensi risiko *greenwashing* terkait investasi pada pembangkit listrik *captive* (IDX Channel, 2024).

Sehubung dengan fenomena tersebut, perusahaan publik harus menjalankan bisnis mereka dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Pemangku kepentingan diharuskan untuk menginformasikan dampak bisnis terhadap kehidupan lingkungan dan sosial pada sebuah laporan keberlanjutan. Beberapa hal mengindikasikan bahwa jika *greenwashing* menjadi praktik yang umum dilakukan, maka hal tersebut akan berdampak pada pencapaian target nasional dan internasional dalam perlindungan lingkungan. Kekurangan pada kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat sekitar dapat dikomunikasikan melalui *sustainability reporting*. Laporan *sustainability reporting* dapat memberikan wawasan tentang dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan perusahaan, yang diungkapkan secara sukarela. Berdasarkan hal tersebut, *sustainability reporting* perusahaan erat kaitannya pada pemberian informasi mengenai praktik ramah lingkungan yang menimbulkan nilai tersendiri bagi perusahaan. *Sustainability reporting* berperan dalam memenuhi kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan kinerjanya pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan (Safitri & Saifudin, 2019).

Perusahaan sektor pertambangan merupakan perusahaan yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Sektor pertambangan memainkan peran dalam memajukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pendapatan oleh perusahaan sektor tambang telah melampaui 127,9 triliun rupiah atau mencapai 301,88% dari target tahun 2022 sebesar 42,37 triliun rupiah (Durlista &

2023). Perusahaan tambang cenderung menarik minat investor, baik n maupun luar negeri. Perusahaan tambang sering kali beroperasi pada



daerah yang terpencil yang memiliki peluang besar dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur. Sektor pertambangan sering dianggap sebagai kontributor utama pencemaran lingkungan. Aktivitas pertambangan memiliki pengaruh yang langsung terhadap lingkungan, misalnya ketidakpastian lingkungan akibat kerusakan lingkungan seperti deforestasi, degradasi tanah, polusi air, dan beberapa kerusakan lingkungan lainnya. Pemerintah terus melakukan perubahan regulasi terkait keberlanjutan pada sektor pertambangan sebagai respons terhadap tuntutan peningkatan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Ada tiga dimensi ketidakpastian lingkungan, yaitu ketidakpastian pasar, ketidakpastian persaingan, dan ketidakpastian teknologi berdasarkan indeks ketidakpastian lingkungan (EUI) (Ariefiara & Mariana, 2018). Perusahaan senantiasa menghadapi ketidakpastian lingkungan yakni ketidakpastian pasar. Ketidakpastian pasar merupakan kondisi terjadinya perubahan selera konsumen secara cepat. Ketidakpastian lingkungan merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi mekanisme pengawasan di dalam perusahaan. Faktor eksternal yang menimbulkan ketidakpastian lingkungan bagi suatu perusahaan menentukan keberhasilan penerapan kebijakan dalam perusahaan (Delfy & Bimo, 2021). Peningkatan ketidakpastian mendorong produsen untuk menggunakan metode produksi yang tidak ramah lingkungan sehingga berkontribusi pada peningkatan emisi CO<sub>2</sub> (Chu & Le, 2022). Sebaliknya, degradasi lingkungan dapat menurun jika ketidakpastian yang tinggi mampu menekan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi (Anser *et al.*, 2021). *Sustainability reporting* dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dalam mengelola risiko yang akan ditimbulkan

akpastian lingkungan sehingga dalam kondisi tersebut para pemangku



kepentingan mengharapkan untuk lebih transparansi dalam menghadapi kondisi tersebut.

Sebagian besar negara termasuk Indonesia, pengungkapan *sustainability reporting* masih bersifat sukarela. Artinya perusahaan mempublikasikannya sesuai dengan keinginan mereka, tanpa adanya peraturan wajib seperti yang mengatur pelaporan keuangan. Situasi ini mungkin disebabkan oleh kurangnya antusiasme perusahaan dalam mengakui pentingnya peran lingkungan dan sosial dalam mencapai tujuan mereka. Kurangnya fokus pemerintah dalam mempromosikan dan mendorong perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap pelestarian lingkungan dan sosial di daerah sekitar operasi mereka menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi keberlanjutan (Safitri & Saifudin, 2019). Laporan keberlanjutan perusahaan mengungkapkan indikator kinerja *bottom line*, yang mencakup sosial, lingkungan dan ekonomi bisnis. Pencapaian tersebut bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan yang berhubungan dengan ekonomi bisnis dan diikuti oleh dampak operasi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Penyusunan laporan keberlanjutan dapat dipengaruhi oleh peran komite audit, yang berfungsi mengawasi kualitas pelaporan, kepemilikan asing yang berfungsi mendorong terjadinya transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta profitabilitas perusahaan yang mencerminkan kapasitas finansial dalam mendukung pelaporan yang berkualitas dan lebih komprehensif. Laporan keberlanjutan ini dipublikasikan untuk membuat pembangunan berkelanjutan dapat terukur dan transparan (Ananda & Yusraini, 2023).

Komite audit adalah badan yang dibentuk oleh jajaran dewan komisaris tugas membantu dalam pemeriksaan terhadap jajaran direksi dalam perusahaan. Komite audit berperan sentral dalam mendukung dewan



komisaris independen dalam menjalankan tugasnya (Delfy & Bimo, 2021). Semakin banyak anggota di dalam sebuah komite audit, maka koordinasi yang terjadi di dalam antara anggota audit akan semakin baik dan berkualitas. Berdasarkan dampak baik yang diberikan sehingga kemampuan dari komite audit akan lebih diefektifkan dalam mengawasi tindakan dalam mengambil sebuah keputusan oleh manajemen entitas dalam perusahaan. Pengawasan yang kuat akan mendorong entitas untuk meningkatkan sikap transparan dalam melakukan pengungkapan laporan informasi sosial dan lingkungannya kepada pihak-pihak yang berwenang serta kepada publik (Brockett & Rezaee, 2012).

Komite audit perlu untuk mengawasi pengembangan keberlanjutan bisnis, strategi, kinerja penilaian risiko dan pelaporan. Baroroh *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa semakin banyak rapat komite audit dalam sebuah perusahaan, semakin banyak rekomendasi yang akan disampaikan oleh anggota komite audit kepada dewan komisaris terkait pengungkapan informasi tanggung jawab sosial. Didukung dengan penelitian Hariono dan Ayu (2023) yang menemukan bahwa pelaporan keberlanjutan perlu untuk mempertimbangkan komite audit dalam mendorong perusahaan untuk mencapai kategori emas dalam skala proper dan mendorong pengungkapan laporan *sustainability reporting* yang lebih tinggi untuk ikut serta dalam pembangunan yang berkelanjutan. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Sofa dan Respati (2020) yang mengungkapkan bahwa komite audit dalam melaksanakan tugasnya berfokus pada penemuan hasil audit dan penelaahan pengaduan di perusahaan sehingga tidak berfokus pada sejauh mana pengungkapan *sustainability reporting*.

Kepemilikan asing mengacu pada jumlah persentase saham perusahaan yang dipegang oleh entitas atau individu asing (luar negeri). Konteks perusahaan Asia menunjukkan bahwa kepemilikan asing dapat melibatkan individu



atau institusi dari luar negeri yang memegang saham perusahaan dalam jumlah besar (Rahmawati & Rohman, 2024). Perusahaan dengan mayoritas saham dimiliki oleh investor asing cenderung memberikan pengungkapan yang lebih komprehensif atas tanggung jawab perusahaan mereka. Kecenderungan tersebut berasal dari ekspektasi yang lebih tinggi yang akan diberikan oleh perusahaan terhadap para pemangku kepentingan internasional yang memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas sosial. Kepemilikan asing di sebuah perusahaan dipandang sebagai pihak yang sangat peduli dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Investor asing cenderung memiliki tingkat pengawasan yang lebih kuat terhadap manajemen, dalam memastikan perusahaan terlibat dalam kegiatan dan inisiatif sosial (Yani & Suputra, 2020).

Kholmi dan Susadi (2021) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Didukung dengan penelitian Amidjaya dan Widagdo (2019) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan asing secara kuat dapat mempengaruhi *sustainability reporting* karena investor asing cenderung menuntut pengungkapan informasi yang lebih banyak termasuk pada informasi sosial dan lingkungan karena mereka peduli akan isu-isu keberlanjutan. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Putra *et al.* (2023) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap *sustainability reporting*. Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan saham oleh pemegang saham asing, baik tinggi maupun rendah, tidak memengaruhi sejauh mana pengungkapan dalam *sustainability reporting*.

Mujiani dan Jayanti (2021) mengungkapkan bahwa *sustainability reporting* dapat dilihat dari sebuah tingkat profitabilitas perusahaan. Tuntutan terhadap perusahaan untuk memperhatikan tingkat profitabilitas yang tinggi menjadi penting untuk menjamin kesejahteraan para pemegang saham. Perusahaan yang



memiliki tingkat profitabilitas tinggi mampu memenuhi tanggung jawab lingkungan dan sosial yang dijelaskan dalam *sustainability reporting*. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada kesejahteraan para pemangku kepentingan yang terlibat atau memiliki kepentingan dengan perusahaan. Tujuan utama pendirian sebuah perusahaan adalah untuk menghasilkan laba sekaligus meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan meningkatkan kegiatan ekonomi bisnis agar menjadi lebih sukses dan *profitable* (Liana, 2019).

Penelitian Liana (2019) didukung Mujiani dan Jayanti (2021) menemukan bahwa profitabilitas mempengaruhi *sustainability reporting*, karena manajemen cenderung memberikan lebih banyak informasi jika ada peningkatan *profit* dalam perusahaan. Penelitian Pratama *et al.* (2023) memperkuat temuan tersebut, yang mengungkapkan bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh pelaporan keberlanjutan. Tidak sejalan dengan hasil penelitian Munandar dan Setiawati (2022) yang menemukan bahwa tingkat profitabilitas sebuah perusahaan tidak dapat mempengaruhi *sustainability reporting* karena laporan tersebut bersifat wajib sehingga baik perusahaan yang memiliki *Return of Asset* (ROA) yang tinggi ataupun rendah, semuanya harus melakukan pengungkapan atas *sustainability reporting* perusahaan.

Teori keagenan juga mendukung bahwa tingkat pengungkapan memiliki pengaruh berdasarkan faktor Komite Audit (Velte, 2024). Hal ini disebabkan teori keagenan dalam sudut pandangnya menyatakan bahwa pemegang saham tertarik untuk memahami bagaimana investasi dalam inisiatif keberlanjutan berkontribusi pada nilai jangka panjang perusahaan dan mereka sendiri (Injeni *et al.*, 2022).

1 Hendrati *et al.* (2023) juga mengungkapkan bahwa teori keagenan kan mengenai perjanjian antara pemegang saham dan agen dalam



mengendalikan perusahaan bahwa sebagian besar tanggung jawab atas perusahaan dilakukan ditangan *agen*. Teori keagenan ini menggambarkan bahwa pemegang saham mempercayakan agen untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas tertentu demi kepentingan perusahaan. Bertolak belakang dengan penelitian Dewi dan Sudana (2024) yang menyebutkan bahwa komite audit dengan tugasnya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan agar mendorong pelaksanaan *good corporate governance*. Berdasarkan hal itu, ketika komite audit melakukan pengawasan di perusahaan memungkinkan jika tidak memberikan dampak langsung pada peningkatan *sustainability reporting* perusahaan (Setiawan & Ridaryanto, 2022).

Teori agensi menyatakan bahwa agensi tidak hanya terbatas pada konflik antara pemilik dan manajer, tetapi juga konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, serta konflik antara pemegang saham dan kreditor (Pratitarari & Honggowati, 2025). Pengungkapan *sustainability reporting* merupakan tanggung jawab manajer kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk strategi untuk mengurangi masalah agensi (Gerged, 2021). Teori agensi menyoroiti permasalahan yang timbul akibat asimetri informasi dan perbedaan tujuan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Tingkat penyebaran kepemilikan yang tinggi cenderung memperburuk konflik keagenan, karena manajer berpotensi memprioritaskan kepentingan pribadi dibandingkan optimalisasi nilai perusahaan bagi pemegang saham (Meqbel *et al.*, 2025).

Penyusunan serta penyajian laporan *sustainability reporting* dipengaruhi oleh integritas moral antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam (Herawaty *et al.*, 2021). Suatu mekanisme tata kelola perusahaan aktif perlu untuk memastikan bahwa tujuan prinsipal dan agen tetap selaras



serta tidak menimbulkan pertentangan antar kepentingan. Sebagian besar penelitian yang menggunakan teori agensi menekankan bahwa profitabilitas berhubungan positif dengan pengungkapan *sustainability reporting*, karena manajer memiliki insentif untuk menunjukkan kinerja baik kepada pemegang saham melalui transparansi laporan berkelanjutan (Gerged, 2021).

Pada konteks ini belum banyak penelitian yang menyoroti tentang ketidakpastian lingkungan memoderasi pengaruh antara komite audit, kepemilikan asing, dan profitabilitas terhadap *sustainability reporting*. Konsep teori kontinjensi menyatakan bahwa efektivitas perusahaan bergantung pada situasi spesifik serta faktor-faktor yang ada di lingkungan (Aliu, 2025). Teori kontinjensi juga berfokus pada pengelolaan organisasi dalam berbagai kondisi operasi yang berbeda dan berusaha menjelaskan bagaimana prosedur pengendalian dilakukan dalam konteks tersebut (Nugraha & Soewarno, 2024). Pendekatan ini relevan untuk *good corporate governance* (GCG) akan dampak yang sama dalam berbagai kondisi. Faktor dalam GCG yang mencakup peran komite audit berpotensi memengaruhi penyusunan laporan keberlanjutan (Fatchan & Trisnawati, 2018).

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Hasan *et al.* (2022) yang meneliti faktor penentu keputusan pelaporan keberlanjutan. Variabel penelitiannya terdiri dari dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional yang terdapat kepemilikan asing di dalamnya serta profitabilitas sebagai variabel kontrol. Perbedaan utama dalam penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen berupa profitabilitas serta variabel moderasi berupa ketidakpastian lingkungan. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pengaruh komite audit, kepemilikan asing, profitabilitas, *sustainability reporting*, dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi.



Peneliti menambahkan profitabilitas sebagai variabel independen karena pada sektor pertambangan, profitabilitas mampu memberikan gambaran yang menyeluruh kepada pemangku kepentingan melalui laporan keberlanjutan. Berdasarkan hal itu, laporan keberlanjutan yang transparan mampu meningkatkan reputasi perusahaan, menarik investor dan mengelola risiko lingkungan serta sosial yang dapat meningkatkan profit perusahaan. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan untuk menciptakan laba yang tinggi sehingga meningkatkan tanggung jawab sosial. Perusahaan akan menunjukkan kinerja yang baik dengan mengungkapkan *sustainability reporting* (Sari *et al.*, 2023).

Peneliti menjadikan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi karena pertimbangan masukan dari penelitian Lendengtariang dan Bimo (2022) yang meneliti pengaruh komite audit terhadap *sustainability reporting*. Sektor pertambangan beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan berisiko tinggi, menciptakan tantangan tersendiri dalam menjalankan aktivitas bisnis secara berkelanjutan. Berdasarkan hal itu, ketidakpastian akan lingkungan memberikan pengaruh bagi perusahaan dalam menyusun strategi keberlanjutannya dan perlu untuk lebih responsif dalam menghadapi kondisi lingkungan dan sosial yang sulit untuk diprediksi. Penelitian ini menggunakan ketidakpastian pasar sebagai dimensi ketidakpastian lingkungan, karena ketidakpastian pasar terjadi karena adanya perubahan dari selera konsumen secara cepat (Ariefiara & Mariana, 2018). Menghadapi lingkungan yang tidak pasti membuat para komite audit akan lebih memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berubah-ubah dan memonitori risiko keberlanjutan yang mungkin akan tidak dapat diprediksi. Jika kondisi ketidakpastian tinggi, maka informasi tersebut mampu meningkatkan

dan mengurangi dampak lingkungan karena memberikan solusi dan penyelesaian yang tepat (Fuadah *et al.*, 2021).



Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh komite audit, kepemilikan asing, dan profitabilitas terhadap *sustainability reporting* dengan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai efektivitas tata kelola perusahaan dan faktor keuangan dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas pelaporan keberlanjutan di tengah dinamika lingkungan bisnis yang kompleks. Penelitian ini juga menekankan pentingnya strategi keberlanjutan yang adaptif sebagai upaya perusahaan dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *sustainability reporting*?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *sustainability reporting*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *sustainability reporting*?
4. Apakah ketidakpastian lingkungan mampu memoderasi komite audit terhadap *sustainability reporting*?
5. Apakah ketidakpastian lingkungan mampu memoderasi kepemilikan asing terhadap *sustainability reporting*?
6. Apakah ketidakpastian lingkungan mampu memoderasi profitabilitas terhadap *sustainability reporting*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian

untuk menguji dan menganalisis berikut ini.

aruh komite audit terhadap *sustainability reporting*



2. Pengaruh kepemilikan asing terhadap *sustainability reporting*
3. Pengaruh profitabilitas terhadap *sustainability reporting*
4. Ketidakpastian lingkungan memoderasi pengaruh komite audit terhadap *sustainability reporting*
5. Ketidakpastian lingkungan memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap *sustainability reporting*
6. Ketidakpastian lingkungan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *sustainability reporting*

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah sebagai bahan studi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi lingkungan. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai peran ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara komite audit, kepemilikan asing, dan profitabilitas terhadap *sustainability reporting*. Hasilnya menjadi dasar pengembangan teori antara faktor internal tata kelola dan dinamika eksternal dalam memengaruhi transparansi pelaporan keberlanjutan. Temuan ini juga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi perusahaan dalam akan informasi dan pengetahuan sebagai pertimbangan dalam ilan keputusan dan pemilihan perusahaan dengan potensi



pengungkapan *sustainability reporting* yang baik. Selain itu, hasil ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan berfungsi sebagai salah satu sarana akuntabilitas dan transparansi terhadap para pemegang saham yang terkait isu lingkungan dan sosial.

#### 1.4.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang digunakan yakni perusahaan-perusahaan sektor tambang yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2021-2024.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti pedoman penulisan tesis dan disertasi Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 2013. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari tujuh bab, yakni bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab kerangka konseptual dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian, bab pembahasan dan bab penutup. Untuk memberikan arahan mengenai tulisan yang jelas, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini para pembaca diperkenalkan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang diteliti, tujuan penelitian, dan alasan dilakukannya penelitian tersebut. Dengan demikian, bab pendahuluan ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II adalah tinjauan pustaka. Bab ini berisi penjelasan sistematis i teori, konsep, pemikiran dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan enelitian yang sedang dilakukan. Bagian ini menjelaskan kerangka dasar



yang menyeluruh terkait konsep, prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Bab III adalah kerangka konseptual dan hipotesis. Pada bab ini berisi uraian mengenai kajian teoritis dan empiris yang disusun secara logis dalam suatu kerangka pemikiran. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dibangunlah kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep yang diteliti. Kerangka konseptual disusun secara deskriptif dan dilengkapi dengan hubungan antar variabel dan indikatornya. Dari kerangka konseptual ini, peneliti dapat merumuskan hipotesis, yang mencerminkan hubungan logis antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan dapat diuji.

Bab IV adalah metode penelitian. Bab ini akan menjelaskan mengenai desain penelitian, situasi dan waktu penelitian, populasi, sampel serta teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian beserta definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

Bab V adalah hasil penelitian. Pada bab ini mencakup deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian.

Bab VI adalah pembahasan. Bab ini akan membahas berdasarkan jawaban penelitian atau rumusan masalah, dengan menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan ke dalam ilmu atau teori yang sudah ada, serta memodifikasi teori yang relevan.

Bab VII adalah penutup. Pada bab ini yakni akhir dari semua bab dalam penelitian yang memuat empat hal pokok, yaitu kesimpulan, implikasi, keterbatasan dan saran peneliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep

##### 2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi berfokus pada kaitan antara manajemen dan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa hubungan agensi tercipta karena terdapat pihak pemilik perusahaan atau *principal* dan pihak yang lain sebagai manajemen atau *agen* yang melaksanakan operasional perusahaan dan menjalankan kewajiban dan amanah dari pemilik perusahaan. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent* (Margaret & Daljono, 2023). Cabeça Serapicos *et al.* (2018) menyatakan bahwa teori agensi tidak dapat dipisahkan dari pihak *principal* dan *agent* yang merupakan pelaku utama dan saling memiliki posisi tawar menawar mengenai peran dan kedudukannya. *Principal* merupakan pemilik modal yang memiliki akses lebih terhadap perusahaan sedangkan agen merupakan pelaku praktik dalam operasional perusahaan yang memiliki informasi mengenai operasi dan kinerja dalam perusahaan secara langsung dan menyeluruh. Melalui laporan yang dilakukan oleh manajemen selaku agen, pemilik perusahaan selaku *principal* mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan digunakan untuk penilaian atas kinerja agen selama periode tertentu.

Teori agensi dalam konteks *sustainability reporting* diharapkan membantu perusahaan dalam meminimalkan konflik keagenan. Melalui pengungkapan laporan keberlanjutan, manajemen dapat memberikan sinyal kepada pemilik mengenai prospek keberlanjutan perusahaan di masa mendatang. Hal ini akan membantu pemilik perusahaan dalam memantau aktivitas bisnis dan menilai



faktor keberlangsungan usaha memungkinkan konflik keagenan diminimalkan tidak hanya melalui laporan keuangan, tetapi juga melalui *sustainability reporting*. Pihak manajemen akan memberikan informasi keberlanjutan perusahaan untuk menekan *agency cost*, pemantauan internal yang memadai dan untuk mendapatkan manfaat pengungkapan keberlanjutan (Octoviany, 2020).

Rustam *et al.* (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing dipandang sebagai salah satu mekanisme tata kelola yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer). Kehadiran investor asing meningkatkan fungsi monitoring karena mereka umumnya memiliki standar tata kelola global yang lebih ketat serta menuntut transparansi informasi yang lebih tinggi. Kepemilikan asing mendorong manajemen untuk lebih aktif mengungkapkan *sustainability reporting* sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk mengurangi asimetri informasi. Selain itu, keterlibatan pemegang saham asing juga mencerminkan adanya dorongan bagi perusahaan untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan praktik keberlanjutan yang diakui secara internasional, sehingga semakin memperkuat peran teori agensi dalam menjelaskan hubungan tersebut (Nuhu & Alam, 2024). Terdapat potensi konflik kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen), terutama dalam hal pengambilan keputusan mengenai alokasi dana perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Profitabilitas yang tinggi memberi perusahaan kemampuan dan insentif untuk menyajikan informasi keberlanjutan secara lebih transparan. Dengan demikian, profitabilitas mendorong manajer untuk mempublikasikan *sustainability reporting* sebagai bentuk akuntabilitas dan strategi mengurangi asimetri informasi (Wulandari *et al.*, 2021).



### 2.1.2 Teori Stakeholder

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) pertama kali diusulkan oleh Stanford Research (SRI) pada tahun 1963. Freeman menyatakan bahwa teori pemangku kepentingan adalah teori yang menjelaskan pihak-pihak yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan dalam setiap kegiatannya harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak, seperti pihak direksi, karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar perusahaan. Freeman mendefinisikan bahwa *stakeholder* sebagai “Any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective.”, yaitu pemangku kepentingan adalah kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan (Freeman, 1984).

Teori *stakeholder* menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Afifah dan Fujianti (2022) menjelaskan bahwa perusahaan bukan hanya sebuah entitas yang beroperasi untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi orang-orang yang mengelola kepentingan tersebut. *Stakeholder* terdiri atas *stakeholder* eksternal dan *stakeholder* internal. Internal *stakeholder* yakni karyawan, pemegang saham, dan direksi. Di sisi lain, pemangku kepentingan eksternal meliputi pelanggan, pemasok, karyawan, vendor dan pihak lain yang berada di luar perusahaan dan memiliki dampak yang signifikan. Jika perusahaan dapat memberikan imbalan yang sesuai atau bahkan imbalan yang lebih besar dari partisipasi yang diberikan, *stakeholder* akan mendukung sepenuhnya. Dengan menggunakan pendekatan model sosial ekonomi, imbalan ini dapat dianggap sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (Sofa & Respati, 2020).



hosali dan Chariri (2014) menyatakan bahwa teori *stakeholder* an harus mampu menjaga nilai pasar usahanya. *Stakeholder* saat ini

termasuk pihak yang menguntungkan dan pihak yang dianggap merugikan bisnis (Satria *et al.*, 2023). Teori pemangku kepentingan berawal pada pola orientasi perusahaan yang bergeser dari orientasi keuangan menjadi orientasi pada pemangku kepentingan. Diskusi pemangku kepentingan dengan perusahaan dilakukan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan melalui laporan keberlanjutan (Salsabila & Novianty, 2022). Laporan keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan salah satu cara untuk menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan perusahaan. Adanya laporan berkelanjutan maka diharapkan dapat memberikan manfaat seperti hubungan yang baik antar perusahaan dengan seluruh *stakeholder* agar mencapai keberlanjutan perusahaan dimasa yang akan datang (Wardoyo *et al.*, 2022).

### 2.1.3 Teori Kontinjensi

Otley (1980) mengatakan bahwa pendekatan kontinjensi sebagai sebuah teori dimulai pada pertengahan tahun 1960 dan pendekatan ini berkembang sangat cepat dalam bidang akuntansi. Chandler (1962) mengungkapkan bahwa teori kontinjensi berfokus pada konsep kesesuaian, yakni kesesuaian antara karakteristik internal organisasi dan faktor kontinjensi di lingkungannya. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada tingkat kesesuaian tersebut. Teori kontinjensi juga menekankan bahwa ketidakpastian lingkungan menjadi salah satu faktor kontinjensi yang penting, karena kondisi yang tidak dapat diprediksi menyulitkan proses perencanaan dan pengendalian. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian, semakin besar dampaknya terhadap penurunan kinerja, sehingga organisasi harus mengembangkan strategi yang situasional untuk ahankan efektivitasnya (Chenhall, 1986).



Pendekatan teori kontinjensi berfokus pada pengelolaan organisasi dalam berbagai kondisi operasi yang berbeda dan berusaha menjelaskan bagaimana prosedur pengendalian dilakukan dalam konteks tersebut. Teori kontinjensi menyatakan bahwa efektivitas perusahaan bergantung pada situasi spesifik dan faktor-faktor yang ada di lingkungan. Pendekatan ini relevan untuk *good corporate governance* (GCG) akan dampak yang sama dalam berbagai kondisi. Faktor dalam *good corporate governance* (GCG) memiliki potensi untuk memengaruhi isi dan kualitas laporan keberlanjutan. Berdasarkan teori kontinjensi memberikan kerangka untuk memahami bagaimana berbagai faktor situasional memengaruhi praktik laporan keberlanjutan di perusahaan. Situasi ketidakpastian lingkungan mendorong perusahaan untuk bersikap lebih responsif dan proaktif dalam menyusun laporan keberlanjutan sebagai upaya mengurangi risiko serta memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Teori kontinjensi dalam hal ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana faktor tersebut saling berinteraksi dalam konteks lingkungan yang dinamis dan tidak pasti (Fatchan & Trisnawati, 2018).

Teori kontinjensi menekankan bahwa tidak ada satu bentuk struktur organisasi yang berlaku secara universal, efektivitas suatu organisasi sangat bergantung pada kesesuaian antara mekanisme internal dengan kondisi eksternal yang dihadapinya (Otley, 1980). Lingkungan eksternal yang penuh ketidakpastian menuntut perusahaan untuk menyesuaikan sistem pengendalian, tata kelola, dan strategi pelaporan agar tetap relevan dan efisien. Tingginya tingkat ketidakpastian lingkungan maka semakin besar juga kebutuhan perusahaan untuk mengadopsi praktik adaptif, termasuk dalam penyusunan laporan keberlanjutan, agar dapat

ngi risiko informasi asimetris dan meningkatkan legitimasi di mata  
ler (Wang *et al.*, 2023).



#### 2.1.4 *Sustainability Reporting*

*Sustainability reporting* merupakan menarik perhatian para pemangku keputusan karena dapat menggambarkan kinerja perusahaan dari perspektif ekonomi, lingkungan dan sosialnya. *Sustainability reporting* ini memberikan bukti bahwa perusahaan telah berkomitmen untuk memerhatikan lingkungan sosialnya sehingga dapat dievaluasi oleh pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang perusahaan. Informasi yang dikemukakan oleh perusahaan juga penting bagi masyarakat yang terlibat dalam operasional perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2017) menyatakan bahwa laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) merupakan laporan yang disampaikan kepada masyarakat yang mencakup kinerja ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup, atau LJK (Lembaga Jasa Keuangan), emiten, serta perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Laporan keberlanjutan ini memuat informasi mengenai kegiatan CSR di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan sebuah komitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan, baik dalam perseroan, komunitas setempat, hingga masyarakat umum (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017). Laporan keberlanjutan yang awalnya hanya pengungkapan yang dilakukan secara sukarela berubah menjadi pengungkapan yang wajib untuk dilakukan, seiring dengan meningkatnya permintaan informasi yang berkelanjutan perusahaan yang lebih baik dari pemangku kepentingan (Susanto *et al.*, 2022). Di Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 mengenai

in keuangan berkelanjutan untuk Lembaga jasa keuangan, emiten, dan



perusahaan publik menjadi acuan dalam penerapan keuangan berkelanjutan serta penyusunan laporan keberlanjutan.

*Global Reporting Initiative (GRI)* adalah standar untuk pembentukan laporan keberlanjutan perusahaan. Laporan keberlanjutan menunjukkan dampak bisnis terhadap aspek lingkungan dan sosial serta ekonomi (Alfaiz & Aryati, 2019). GRI pertama kali diterbitkan pada tahun 2000 dan standar GRI terbaru diterbitkan pada 2016. Pelaporan secara terbuka perihal dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan, termasuk bagaimana organisasi dapat mendukung tujuan dari pembangunan dan berkelanjutan yang disebut dengan standar laporan keberlanjutan GRI. Tujuan dari standar GRI ini adalah sebagai seperangkat standar yang saling berhubungan dan untuk membantu perusahaan dalam membuat laporan keberlanjutan yang mematuhi pedoman pengelompokan utama dari standar GRI yang terdiri dari empat seri yakni, seri 100 untuk ekonomi, seri 300 untuk lingkungan hidup dan seri 400 untuk sosial (Setiawan & Ridaryanto, 2022).

#### **2.1.5 Komite Audit**

Komite audit mendukung dewan komisaris dalam melakukan pengawasannya terhadap pengelolaan perusahaan. Pengawasan atas pengelolaan usaha berfungsi untuk mengawasi proses atas penyusunan laporan keuangan dan audit, serta untuk pengawasan independen atas manajemen dan pengendalian risiko dan pelaksanaan proses tata kelola perusahaan (Oktaviani & Amanah, 2019). Tata kelola sebuah perusahaan yang baik dapat dicapai melalui pembentukan komite yang dikenal dengan komite audit. Frekuensi rapat komite

memberikan dampak yang tinggi pada pengawasan dan evaluasi, termasuk pertukaran ide dan pengetahuan antar anggota dalam pengambilan



keputusan yang dibutuhkan untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan, utamanya dalam pengungkapan *sustainability reporting* (Meutia *et al.*, 2023).

Komite audit dibentuk oleh perusahaan untuk berperan sebagai jembatan antara direksi, auditor eksternal, auditor internal, dan anggota independen. Komite audit mengawasi audit dan meminta manajemen melakukan koreksi yang sesuai dengan peraturan dan hukum. Kehadiran komite audit dapat mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan yang sepenuhnya terintegrasi, seperti laporan *sustainability reporting* (Wulandari *et al.*, 2021). Komite audit merupakan suatu badan yang dibentuk oleh perusahaan untuk mendukung penerapan *Good Corporate Governance*, khususnya dalam hal pengawasan dan pengendalian internal. Komite audit mendukung dewan komisaris dalam mengawasi audit laporan keuangan, penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) (Sofa & Respati, 2020).

Komite audit sangat diperlukan dalam perkembangan manajemen perusahaan. Komite audit akan bekerja sama dengan auditor internal dan eksternal untuk membantu manajemen memastikan bahwa pengendalian internal dan pelaporan keuangan di perusahaan yang dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan telah berjalan secara efektif dan legal. Fungsi komite audit antara lain memantau kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan informasi keuangan, efektivitas audit internal dan eksternal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan, dan undang-undang yang berlaku (Octoviany, 2020).

#### 2.1.6 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing mengacu pada bagian dari saham yang beredar dan oleh investor asing, yang dapat berupa individu, entitas bisnis atau pemerintah yang berbasis di luar negeri. Para pemegang saham asing



dapat terdiri dari berbagai pihak, seperti perusahaan milik individu, badan hukum atau instansi pemerintah yang berbasis di negara lain. Kepemilikan asing mencerminkan persentase modal saham yang dimiliki oleh pihak asing dibandingkan dengan total saham yang terdaftar di perusahaan. Kepemilikan asing dalam perusahaan dianggap sebagai entitas yang peduli terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena kepemilikan asing memiliki tingkat pengawasan yang kuat terhadap manajemen dalam melaksanakan kegiatan sosial (Yani & Suputra, 2020).

Perusahaan yang memiliki porsi signifikan dari kepemilikan asing umumnya menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap operasional secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan tuntutan dari investor asing yang menekankan efisiensi, transparansi dan tata Kelola yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu area fokus utama perusahaan dengan kepemilikan asing adalah memaksimalkan profitabilitas, yang diwujudkan melalui pengelolaan operasi yang lebih ketat dan terstruktur. Tekanan dan harapan dari investor asing memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih tekun dalam pengembangan strategis, manajemen sumber daya dan pengelolaan risiko yang pada akhirnya akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan keuangan dan meningkatkan nilainya. Perusahaan multinasional dengan kepemilikan asing umumnya menyadari bahwa keuntungan legitimasi berasal dari aset yang menguntungkan bagi perusahaan dan untuk mencapainya, mereka memerlukan strategi yang komprehensif untuk menjadi media yang baik (Amidjaya & Widagdo, 2019).

#### 2.1.7 Profitabilitas



Profitabilitas adalah laba yang diperoleh perusahaan sebagai ukuran dari perusahaan tersebut. Damayanti *et al.* (2021) menyebutkan bahwa

profitabilitas merupakan perbandingan antara total aset dengan total modal yang dimiliki oleh perusahaan, atau mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi mampu memenuhi harapan *stakeholder* dalam membangun hubungan yang baik dengan perusahaan. Dengan demikian, manajemen berupaya untuk memastikan agar laba yang dihasilkan perusahaan tetap stabil (Mayasari & Ariani, 2021). Perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang tinggi cenderung memiliki kapasitas dan dorongan yang lebih besar untuk melakukan transparansi atas aktivitas keberlanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi keuangan internal perusahaan tetap menjadi salah satu determinan penting dalam keputusan pengungkapan (Dewi *et al.*, 2025).

Dewi (2019) menyebutkan bahwa rasio profitabilitas adalah faktor penting karena operasional perusahaan harus berlangsung dalam kondisi yang menguntungkan. *Return On Asset* (ROA) adalah rasio fundamental yang sering digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang berkaitan dengan aset tertentu. Investor dapat memanfaatkan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan untuk memutuskan apakah akan mempertahankan investasinya atau mencari alternatif lain. Jika kinerja perusahaan baik, nilai usaha yang dihasilkan akan tinggi (Mujiani & Jayanti, 2021).

Keahlian perusahaan dalam menghasilkan laba akan berdampak pada aktivitas di dalamnya. Secara teoritis, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin kuat pula hubungan pengungkapan sosial yang dimilikinya.

Dengan meningkatnya profitabilitas, maka *sustainability reporting* akan mengalami tan yang signifikan (Kusuma & Priantinah, 2018). Profitabilitas yang tinggi perhatian investor jangka panjang untuk mengambil keputusan investasi



di perusahaan-perusahaan yang mampu menghasilkan profitabilitas tinggi, karena dianggap mampu mengelola dana besar dari para investor (Sari & Wahidahwati, 2021).

### 2.1.8 Ketidakpastian Lingkungan

Milliken (1987) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan adalah faktor kontinjensi yang signifikan karena dapat membuat proses perencanaan dan pengendalian menjadi lebih kompleks. Faktor eksternal yang menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan untuk tetap bertahan dalam sebuah bisnis menentukan keberhasilan implementasi dalam kebijakan perusahaan. terdapat lima aspek yang dapat memengaruhi manajemen dalam mengelolah masalah lingkungan. Aspek tersebut berupa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tekanan pelanggan, ketidakpastian lingkungan, ekspektasi keuntungan bisnis dan tanggung jawab sosial (Ali *et al.*, 2019). Ketidakpastian lingkungan disebabkan oleh perubahan berbagai elemen yang terjadi di luar perusahaan berupa keinginan pelanggan perusahaan, perubahan teknologi dan struktur persaingan (Delfy & Bimo, 2021). Ketidakpastian muncul ketika probabilitas sulit dipahami dan sulit untuk diukur, seperti konsekuensi yang tidak dapat diprediksi dari iklim (Ao *et al.*, 2023). Terdapat tiga dimensi ketidakpastian lingkungan seperti ketidakpastian pasar, ketidakpastian persaingan, dan ketidakpastian teknologi berdasarkan indeks ketidakpastian lingkungan (EUI) (Arieftiara & Mariana, 2018).

Gani dan Etty (2024) mengungkapkan bahwa ketidakpastian lingkungan sering kali mendorong organisasi untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang kitarnya. Tingginya ketidakpastian muncul akibat kurangnya pengalaman jetahuan manajemen dalam mengantisipasi perubahan yang mungkin



terjadi di masa depan. Ketidakpastian lingkungan mencerminkan tantangan yang dihadapi seorang manajer dalam memprediksi dengan tepat berbagi faktor sosial dan fisik, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku manajemen secara langsung (Carolina & Purwantini, 2020).

## 2.2 Tinjauan Empiris

Dasar dari penelitian sebelumnya dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh:

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan *et al.* (2022) yaitu faktor penentu keputusan pelaporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 138 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Pakistan selama tahun 2009-2018. Penelitian ini menggunakan model regresi logistik untuk menganalisis data. Hasil pengujiannya menemukan bahwa komite audit yang lebih besar dan kepemilikan asing memberikan pengaruh terhadap *sustainability reporting*. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari *et al.* (2021) yaitu pengaruh komite audit dan struktur modal terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Penelitian ini dilakukan pada 102 perusahaan yang mengikuti *asia sustainability reporting* rating tahun 2015-2020. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan software *Eviews* versi 9. Hasil pengujiannya menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel komite audit terhadap *sustainability reporting*. Penelitian Baroroh *et al.* (2022) yaitu pengaruh ukuran perusahaan dan komite audit terhadap *sustainability reporting*, penelitian ini dilakukan pada 61 perusahaan yang terdaftar di LQ45 rentang tahun 2017-2019. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa ukuran komite audit mampu meningkatkan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *sustainability reporting*.



Penelitian yang dilakukan oleh Kholmi & Susadi (2021) yaitu pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap *sustainability reporting*. Penelitian ini dilakukan pada 47 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2018. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan dari Smart PLS 3. Hasil pengujiannya mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *sustainability reporting*. Penelitian Rustam *et al.* (2019) yaitu pengaruh kepemilikan asing terhadap *sustainability disclosure* di Pakistan. Penelitian ini menggunakan metode campuran berurutan dengan menggunakan data yang berasal dari bursa efek Pakistan tahun 2006-2018. Hasil pengujiannya mengungkapkan bahwa kepemilikan asing secara efektif meningkatkan mekanisme tata kelola keberlanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Liana (2019) yaitu pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Penelitian ini dilakukan pada 7 perusahaan tambang yang terdaftar di IDX periode tahun 2011-2015, menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Penelitian Mujiani & Jayanti, (2021) yaitu pengaruh profitabilitas dan *good corporate governance* terhadap *sustainability reporting*. Penelitian ini dilakukan pada 9 perusahaan peserta ISRA di Indonesia tahun 2013-2017 dengan analisis regresi berganda melalui bantuan dari SPSS. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh

positif terhadap *sustainability reporting*.



Penelitian yang dilakukan oleh Hariono dan Ayu (2023) yaitu pengaruh dewan komisaris independensi, komite audit serta profitabilitas yang disertai *leverage* dalam mengungkapkan laporan *sustainability*. Penelitian ini dilakukan pada 115 perusahaan dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2021 dengan analisis regresi linear berganda melalui bantuan IBM SPSS. Hasil pengujiannya menemukan bahwa komite audit dan profitabilitas berdampak pada pengungkapan *sustainability reporting*. Penelitian Fuadah *et al.* (2022) yang dilakukan pada 140 perusahaan yang terdaftar di BEI rentang tahun 2018-2020. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola dalam sebuah perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fuadah *et al.* (2021) yaitu ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh dalam pengungkapan lingkungan. Penelitian ini dilakukan pada 161 perusahaan manufaktur, dengan analisis datanya menggunakan bantuan SEM-PLS. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Penelitian Durugbo dan Amankwah-Amoah (2019) yaitu menangani keberlanjutan global dalam ketidakpastian. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa terdapat tiga fase dalam inovasi keberlanjutan yakni tekanan kuat dari kelompok, investasi dan merampingkan operasi.

